

**SKRIPSI**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota  
Pekanbaru)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**DISUSUN OLEH :**

**ARISA ARIANI**  
**155310334**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ARISA ARIANI  
NPM : 155310334  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-S1  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan  
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan  
Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern  
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)

**Disahkan Oleh :**

PEMBIMBING

Hariswanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA

**Mengetahui :**

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

## ABSTRACT

### THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCE, THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL INTERNS THE QUALITY REPORT LOCAL GOVERNMENT FINANCE (Empirical Study on SKPD Pekanbaru City)

This study aims to determine the effect of the competence of human resources, financial accounting system application areas, use of information technology and internal control of the quality of local government financial statements Pekanbaru City.

This research was conducted at the office / agency in the city of Pekanbaru, which amounted to 30 SKPD. Population and sample included Head of Office, Head of Finance Subdivision, and Staff of Program Arrangement subdivision in SKPD. This research is a survey research with 2 respondents in each institution so that there are 60 respondents. Data collection was carried out by distributing 60 questionnaires to 30 related agencies. Determination of the sample by using purposive sampling method and using multiple linear regression analysis models with the help of SPSS 22.0 software application.

The results of this study indicate that the competence of human resources, the application of regional financial accounting systems, the utilization of information technology and internal control systems together or simultaneously have a significant effect on the quality of the financial statements of the Pekanbaru City government. While partially, human resource competence, the application of the regional financial accounting system and the internal control system did not have a significant effect on the quality of the local government financial reports, but the partial use of technology had a significant effect on the quality of the Pekanbaru local government financial reports.

**Keywords:** Human Resource Competencies, Application of Regional Financial Accounting Systems, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Quality of Regional Government Financial Reports.

## ABSTRAK

### **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)**

**OLEH: ARISA ARIANI**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan pada dinas/instansi yang berada di lingkungan Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 SKPD. Populasi dan sampel antara lain yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan staf subbagian Penyusunan Program pada SKPD. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan responden sebanyak 2 orang pada tiap instansi sehingga jumlah responden sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan 60 kuesioner pada 30 instansi terkait. Penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi software SPSS 22.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan secara parsial, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi pemanfaatan teknologi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral komprehensif sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih ditemui kekurangan-kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Bapak Hariswanto, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Terima kasih kepada orang tua saya, Ayahanda Abu Bakar Rachman dan Ibunda Riatni Anita yang selalu mendoakan saya, membesarkan dan mendidik saya hingga seperti saat ini serta mendukung saya secara moril dan materil sehingga saya bisa mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
7. Terima Kasih untuk kakak saya, Dachnia Karandita, SE dan Yoleta Rachman, S.Si, abang saya M. Sean Rachman, SE. dan M. Fajrian Rachman, SE. serta adikku Rivaldi Rachman dengan tulus dan ikhlas membantu dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat selesai. Masukan dan semangat dari kalian sangat berarti untuk saya.
8. Terima kasih untuk M. Kurniawan Arief atas semangat dan waktunya dengan sabar menemani saya untuk mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan, Dedek, Selvi, Delvia, Angga, Okta, Rahma, Dini semoga ilmu yang kita tempuh selama di UIR dapat kita gunakan dengan baik dan sukses terus untuk kedepannya.

10. Seluruh pegawai SKPD Kota Pekanbaru yang telah menjadi responden pada penelitian ini, terima kasih atas partisipasi dan dukungannya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan untuk penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru,

2019

Penulis

ARISA ARIANI  
1553103334

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
A. Telaah Pustaka .....	11
1. Laporan Keuangan .....	11
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	16
5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) .....	17
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	19
7. Sistem Pengendalian Intern.....	19
8. Hubungan Antar Variabel .....	20
a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	20



b. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	21
c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	22
d. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	23
9. Review Penelitian Terdahulu .....	25
10. Kerangka Pemikiran .....	26
B. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
1. Objek Penelitian .....	28
2. Operasional Variabel Penelitian .....	28
3. Populasi dan Sampel .....	31
4. Jenis dan Sumber Data .....	34
5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
6. Uji Kualitas Data .....	35
7. Teknik Analisis Data .....	37
8. Pengujian Hipotesis .....	38
9. Koefisiensi Determinasi .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Kota Pekanbaru .....	40
2. Daftar SKPD di Kota Pekanbaru .....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>

1. Hasil Penelitian .....	47
2. Statistik Deskriptif .....	48
3. Uji Kualitas Data.....	49
4. Uji Asumsi Klasik.....	51
5. Analisis Data .....	56
6. Pengujian Hipotesis .....	58
7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
8. Koefisien Determinasi.....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
1. Kesimpulan .....	66
2. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

#### Halaman

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1 Daftar SKPD Kota Pekanbaru.....	32
Tabel V.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	47
Tabel V.2 Karakteristik Responden.....	48
Tabel V.3 Statistik Deskriptif Penelitian .....	49
Tabel V.4 Hasil Uji Validitas Data .....	50
Tabel V.5 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	51
Tabel V.6 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel V.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel V.8 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	56
Tabel V.9 ANOVA (Uji F) .....	60
Tabel V.10 Hasil Koefisien Regresi Linear Berganda.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1 Model Penelitian.....	26
Gambar V.1 <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	52
Gambar V.2 <i>Normal P-Plot of Regression Standardized Residual</i> .....	53
Gambar V.3 <i>Scatterplot</i> .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1: Kuesioner

Lampiran 2: Tabulasi Data

Lampiran 3: Uji Validitas

Lampiran 4: Uji Reliabilitas

Lampiran 5: Regresi Linear



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah

pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (UU No. 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami?

Berbagai faktor dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan juga penyerahan LKPD tidak tepat waktu. Selain itu LKPD Kota Pekanbaru pada tahun lalu mendapat banyak kritikan dari BPK terkait tidak lengkapnya beberapa naskah dan juga adanya beberapa aset yang belum dikembalikan. Selain itu juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dari data yang di peroleh BPK kenyataannya masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum (Pekanbaru.tribunnews.com).

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang dalam pelaporannya belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu pendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Ada beberapa fenomena yang terjadi khususnya di Pekanbaru mengenai peran penting kompetensi sumber daya manusia, yaitu masih ada dinas-dinas yang memiliki kinerja yang belum memuaskan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang terdapat di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah harus lebih gencar lagi untuk memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang terdapat di pemerintahan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Nurillah, 2014).



Penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam mengelola anggaran daerah (APBD). Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan adalah perubahan *single entry* menjadi *double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo: 2006).

Hal lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan berdampak secara nyata dalam pemrosesan data dari sistem manual ke sistem

computer dan bermunculannya software untuk akuntansi yang akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan.

Banyak hal positif yang diperoleh dari adanya teknologi informasi, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah, terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak tau atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi sia-sia dan semakin memperbesar biaya yang akan dikeluarkan. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia, dan keterbatasan dana. Kendala tersebut menjadi faktor pemanfaatan teknologi di pemerintahan belum optimal.

Hal terakhir yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian intern memiliki peran yang sangat penting dalam membuat laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh Wardani (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

semakin baik kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan menyebabkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan.

Menurut Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014) yang juga telah melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) menghasilkan hipotesis bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Perbedaan hasil penelitian dan ketidakkonsistenan serta masih banyaknya organisasi pemerintahan yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pendorong dan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.

### b) Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan menyediakan informasi terkait kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.

### c) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

### d) Bagi organisasi sektor publik atau pihak terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih optimal.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas enam bab yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, lokasi dan objek penelitian, operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

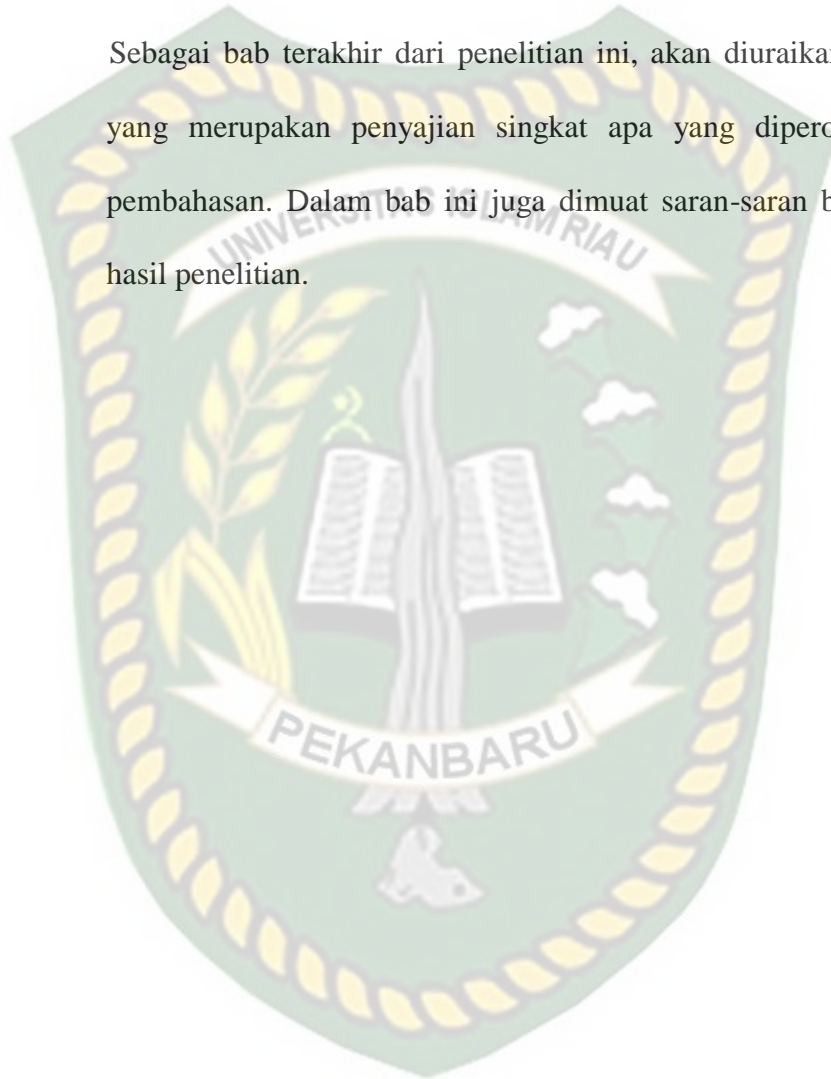
Bab ini berisikan tentang keadaan umum Kota Pekanbaru, demografi Kota Pekanbaru dan sejarah Kota Pekanbaru.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB VI : PENUTUP

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini, akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### A. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan (Munawir 1995:2).

Menurut Hanafi (2003:69), laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, *timing* aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Munawir (1995:5), laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan keuangan dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba rugi serta keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya.



## 2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat

normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### 1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsure-unsur berikut:

##### a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

##### b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

##### d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### 2) Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

a. Dapat diuji (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar/jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Laporan keuangan bagi pihak internal merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD. Sementara itu jika dilihat dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat umum, investor, kreditor, lembaga donor, akademisi, dan pengamat, pers, kamar dagang dan publik nasional dan daerah, serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, publik, dan politik (*external accountability*).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan secara relevan dan reliable serta perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Laporan keuangan juga dibuat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi memiliki arti keterbukaan (*openness*), yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, sedangkan akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja publik pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri.

Kompetensi sumber daya manusia yang mencakup kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Menurut Prijono (2001) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan

yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin,2004: 89) yaitu :

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Pengalaman

Pramudiarta (2015) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuanagan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan menjadi asset yang sangat berharga bagi suatu pemerintahan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dapat menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna baik internal maupun eksternal.

#### **5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut.

Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap Pemda.

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 mendefinisikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi publik.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang disebut sebagai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang disebut Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP), yaitu :

1. Basis Akuntansi

SAKD mempunyai basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca.

2. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (*double entry system*) didasarkan pada persamaan akuntansi. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

Laporan keuangan dibuat oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan keuangan yang harus dibuat adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester pertama dan semester kedua. Laporan semester kedua berisi data dan informasi keuangan semester satu (I) dan semester dua (II).

#### **6. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi selalu memberikan inovasi dan pembaharuan di dunia, dalam semua bidang, teknologi mampu membuat mesin dan sesuatu yang baru yang biasa dimanfaatkan oleh manusia yang ada di dunia. Teknologi Informasi adalah sebuah perangkat alat yang mampu membantu pekerjaan manusia dengan informasi dan melakukan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan proses informasi (Haag & Keen).

Nurillah (2014) pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah kerja manusia sehingga dalam prosesnya lebih efektif dan efisien.

#### **7. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan (Nurillah, 2014).



Tujuan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*froud*). Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003 :8) :

1. Adanya perlindungan fisik terhadap harta
2. Pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan
3. Adanya jejak audit yang baik
4. Sumber daya manusia yang optimal

## **8. Hubungan Antar Variabel**

### **a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

SDM yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas

dapat diterapkan. Sebaliknya jika SDM tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi maka pelaksanaan dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diterapkan.

Dalam penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi / tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Nurillah (2014) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/ tata usaha keuangan yang ada di SKPD Kota Depok sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

#### **b. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mempermudah setiap entitas dalam menyusun laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintah. Dengan bantuan sistem informasi akuntansi akan memberikan manfaat yaitu:

- a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada *value chain* secara efektif dan efisien
- b. Meningkatkan efisiensi
- c. Meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan d.

Meningkatkan *sharing knowledge*

- e. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah

daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sesuai dengan penelitian Nurillah (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **d. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Masih adanya penyimpangan dan kebocoran dalam laporan keuangan serta hasil audit dengan opini “ wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan/atau *disclaimer*” yang ditemukan oleh BPK, menjadi bukti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi kaarakter/ nilai informasi yang disyaratkan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga asset suatu entitas dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Keakuratan data akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas eektivitas SPI. Pengendalian intern pemerintah pusat dan daerah di rancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 9. Review Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dari beberapa jurnal yang berbeda.

**Table II. 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

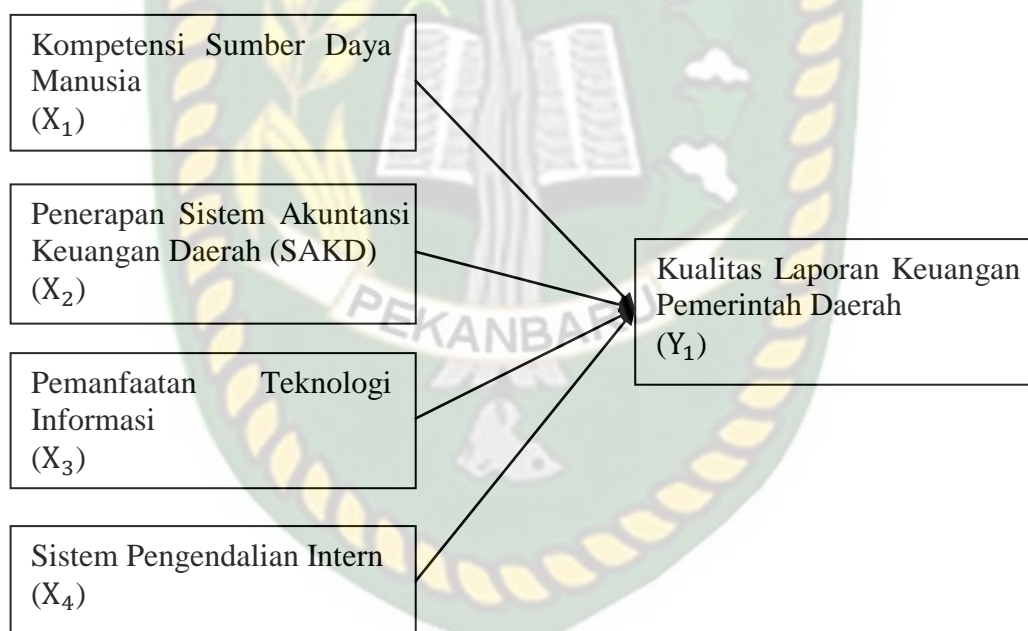
No	Nama Peneliti/ tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)	Independen: Kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern. Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	- Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah - Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Wardani (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daera, pemanfaatan	Independen: Kompetensi SDM, penerapan SAKD,	- Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

		teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kabupaten labuhan batu)	pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern. Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	- Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	Pramudi arta (2015)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD Di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)	Independen: Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern Dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.	- Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi - Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi - Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.
4	Octarinda (2016)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab. Langkat)	Independen: Kompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pengendalianintern pemerintah Dependen: Kualitas laporan keuangan daerah	- Kompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Langkat.

## 10. Model Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

**Gambar II. 1**  
**Model Penelitian**



## 2. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka diatas, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

- H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
- H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
- H4 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
- H5: Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pekanbaru.

#### B. Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian.

##### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

##### a) Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut peraturan pemerintah no 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menurut Mahmudi (2011:143) merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Wardani (2017). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami, dengan menggunakan skala likert satu

sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “Sangat Setuju”.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negative (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

### a) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan juga efisien.

Menurut Anwar (2002:2) sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai satu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individual pegawai.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner, yang diambil dari penelitian Wardani (2017). Terdapat tiga indikator, yaitu: (1) Pengetahuan, (2) Keterampilan, dan (3) Sikap dengan menggunakan skala likert satu sampai lima dimulai dari (1) “Sangat tidak setuju” hingga (5) “Sangat setuju”.

### b) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menurut pasal 232 ayat (3) Pemendagri no. 13 tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner, yang diambil dari Wardani (2017) dengan model skala likert lima poin dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “Sangat Setuju” serta dengan indikator (1) Tingkat Kecepatan, (2) Tingkat Keamanan, (3) Tingkat Kualitas Hasil, dan (4) Tingkat Efisiensi Biaya.

c) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*interner, intranet*) *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000).

Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi menggunakan instrument kuesioner Wardani (2017). Indikator variabel ini yaitu (1) Komputer, dan (2) Jaringan Internet. Dengan skala likert 5 poin dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “Sangat Setuju”.

d) Sistem Pengendalian Intern (X4)

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber

daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011).

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Ari (2014). Variabel pengendalian internal ini dapat diukur dengan instrument yang dibuat oleh Xu, et al. (2003) dan dikembangkan oleh Choirunnisah (2008).

Terdapat 5 indikator, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan, dengan menggunakan skala likert 5 poin dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “Sangat Setuju”.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berlainan ( Supranto, 2000).

Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang berjumlah 44 SKPD dan yang dijadikan sampel sebanyak 30 SKPD. Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini disebabkan sebagian objek yang tersebar di wilayah yang cukup luas, serta keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Pemilihan badan, dinas dan inspektorat dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan

kerja pemerintah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksanaan anggaran dari pemerintah daerah.

**Table III. 1**  
**Daftar Populasi SKPD Kota Pekanbaru**

No	Nama SKPD Kota Pekanbaru
1.	Sekretariat Daerah
2.	Secretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Tenaga Kerja
10.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12.	Dinas Ketahanan Pangan
13.	Dinas Pertanian
14.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
15.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
17.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
18.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
19.	Dinas Perhubungan
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
22.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Umum Satu Pintu
23.	Dinas Pemuda Dan Olahraga
24.	Dinas Pertanian Dan Perikanan
25.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29.	Badan Penelitian Dan Pengembangan
30.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

32.	Satuan Polisi Pamong Praja
33.	Kecamatan Pekanbaru Kota
34.	Kecamatan Rumbai
35.	Kecamatan Payung Sekaki
36.	Kecamatan Sukajadi
37.	Kecamatan Rumbai Pesisir
38.	Kecamatan Senapelan
39.	Kecamatan Tampan
40.	Kecamatan Sail
41.	Kecamatan Tenayan Raya
42.	Kecamatan Marpoyan Damai
43.	Kecamatan Limapuluh
44.	Kecamatan Bukit Raya

Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas/Kabag/Sekretaris/Fungsional Umum dan Kasubbag/Kasubbid Keuangan/Bendahara/Staff Keuangan/Pelaksana pada 30 SKPD. Tiap SKPD ditetapkan sebanyak 2 orang yang menjadi responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang akan disebar ke SKPD yang berada di kota Pekanbaru sebanyak 60 lembar kuesioner.

**Table III. 2**  
**Daftar populasi SKPD Kota Pekanbaru**

No.	Nama SKPD Di Kota Pekanbaru	Responden
1.	Sekretariat Daerah	2
2.	Secretariat DPRD	2
3.	Inspektorat Daerah	2
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
5.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2
6.	Dinas Sosial	2
7.	Dinas Tenaga Kerja	2
8.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2
9.	Dinas Kesehatan	2
10.	Dinas Ketahanan Pangan	2
11.	Dinas Pertanahan	2
12.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2

13.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2
14.	Dinas Pendidikan	2
15.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2
16.	Dinas Perhubungan	2
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistic Dan Persandian	2
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Umum Satu Pintu	2
20.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2
21.	Dinas Pertanian Dan Perikanan	2
22.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2
23.	Badan Pendapatan Daerah	2
24.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya	2
25.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2
26.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2
27.	Kecamatan Limapuluh	2
28.	Kecamatan Sail	2
29.	Kecamatan Marpoyan Damai	2
30.	Kecamatan Pekanbaru Kota	2
	Total	60

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan pada responden.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner. Survey kuesioner merupakan metode survey dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat

pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti (Supranto, 2000). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut.

#### **F. Uji Kualitas Data**

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

##### **a. Uji Validitas Data**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas item-item pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk. Apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas  $<0,01$  atau  $<0,05$  berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2006).

##### **b. Uji Reliabilitas**



Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpa untung masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha  $>0,60$ .

### c. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang digambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance  $>0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yang membandingkan data yang ada dengan berbagai teori yang mendukung dan bersifat menjelaskan atau menguraikan dan memakai bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 23.00. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan SKPD Kota Pekanbaru,

analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

a: konstanta

X1: kompetensi SDM

X2: penerapan SAKD

X3: pemanfaatan teknologi informasi

X4: sistem pengendalian intern

$\beta_1$ : koefisien regresi X1

$\beta_2$ : koefisien regresi X2

$\beta_3$ : koefisien regresi X3

$\beta_4$ : koefisien regresi X4

e: tingkat kesalahan pengganggu (error)

#### H. Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dalam penelitian ini akan menggunakan uji t dan uji f untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan.

#### I. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah suatu nilai statistic yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan variasi nilai variabel

independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2001:83).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

#### A. SEJARAH KOTA PEKANBARU

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh orang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Kaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut) Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung , Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Keputusan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

**B. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berubah nama menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekanbaru**

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tahun 2017, terjadi perubahan penyebutan istilah SKPD menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari pengesahan OPD tersebut , dalam penerapannya ada yang dipecah, dihapus dan ada juga digabung dengan

dinas yang lain, serta ada dibuat dinas baru. Perubahan ini tidak merubah fungsi dan tugas dari kerja kedinasan masing-masing, ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan penyusunan Operasi Perangkat Daerah yang lebih efisien dan sesuai dengan aturan yang diberikan. Karena itu, Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus, MT berharap kinerja pelayanan dapat lebih efektif dan lancar.

Perangkat yang telah disahkan dimulai dari tipe A, tipe B dan tipe C. Total jabatan structural berkurang hingga 8,78% atau dari 1.200 lebih jabatan menjadi 1.100 jabatan structural mulai dari Eselon IIA hingga Eselon IVD.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016, dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Dengan berlakunya Perda ini, maka:

1. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.



2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 16, Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016).

### **C. Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru**

Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Table IV.1**  
**Organisasi Perangkat Daerah**

No	Nama SKPD Kota Pekanbaru
1.	Sekretariat Daerah
2.	Secretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Tenaga Kerja
10.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12.	Dinas Ketahanan Pangan
13.	Dinas Pertanian
14.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
15.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
17.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
18.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
19.	Dinas Perhubungan
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik Dan Persandian
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
22.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Umum Satu Pintu
23.	Dinas Pemuda Dan Olahraga
24.	Dinas Pertanian Dan Perikanan
25.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29.	Badan Penelitian Dan Pengembangan
30.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
32.	Satuan Polisi Pamong Praja
33.	Kecamatan Pekanbaru Kota
34.	Kecamatan Rumbai

35.	Kecamatan Payung Sekaki
36.	Kecamatan Sukajadi
37.	Kecamatan Rumbai Pesisir
38.	Kecamatan Senapelan
39.	Kecamatan Tampan
40.	Kecamatan Sail
41.	Kecamatan Tenayan Raya
42.	Kecamatan Marpoyan Damai
43.	Kecamatan Limapuluh
44.	Kecamatan Bukit Raya

Sumber: <http://dtrb.pekanbaru.go.id>

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada 30 SKPD di Kota Pekanbaru. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Dinas/Kabid/Kabag/Sekretaris dan Kasubbag/Kasubbid/Staff Keuangan yang ada di SKPD Kota Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 2 September 2019 dan selesai pada tanggal 17 September 2019. Total Kuesioner yang dibagikan adalah 60 kuesioner (100%), dimana pada setiap kantor instansi/dinas dibagikan sebanyak 2 kuesioner. Total kuesioner yang dikembalikan 47 kuesioner (78,3%), total kuesioner yang dapat dianalisis 47 kuesioner, total kuesioner yang tidak kembali 13 kuesioner, dikarenakan responden belum mengisi/sibuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1

**Tabel V.1**  
**Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>persentase</b>
Total kuesioner yang dikirim	60	100%
Total kuesioner yang kembali	47	78,30%
Total kuesioner yang tidak kembali	13	21,70%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	47	78,30%

**Sumber: Data Olahan, 2019**

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan dan lama bekerja. Adapun karakteristik responden pada instansi dinas dan badan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel V.2**  
**Karakteristik Responden pada Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru**

no	Karakteristik	jumlah	persentase
1	jenis kelamin		
	1. laki-laki	18 orang	38%
	2. perempuan	29 orang	62%
	Total	47 orang	100%
2	pendidikan terakhir		
	1. SMA	8 orang	17%
	2. D3	5 orang	10,60%
	3. S1	28 orang	59,50%
	4. S2	6 orang	12,90%
	Total	47 orang	100%
3	Jurusan		
	1. akuntansi	23 orang	49%
	2. manajemen	11 orang	23,40%
	3. pertanian	1 orang	2,10%
	4. MIPA	1 orang	2,10%
	5. lain-lain	11 orang	23,40%
	Total	47 orang	
4	Jabatan		
	1. kasubbag keuangan	20 orang	43%
	2. staff akuntansi	27 orang	57%
	Total	47 orang	100%
5	lama bekerja		
	1. 1-5 th	9 orang	19,10%
	2. 5-10 th	15 orang	31,91%
	3. >10 th	23 orang	48,99%
	Total	47 orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

### B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil kuesioner, tabel *descriptive statistic* dapat dilihat pada tabel V.

**Tabel V.3**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	47	25.00	38.00	31.2553	3.47330
SAKD	47	16.00	25.00	20.4043	2.37432
Pemanfaatan TI	47	20.00	35.00	27.5319	3.64662
SPI	47	29.00	42.00	36.3830	2.67479
Kualitas LKPD	47	20.00	41.00	33.6383	4.01857
Valid N (listwise)	47				

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan tabel V.3 tersebut dapat dilihat kompetensi SDM mempunyai nilai minimum 25,0 dan maksimum 38,0 serta 31,25 sebagai nilai rata-rata jawaban responden dengan standar deviasi 3,47. Penerapan SAKD memiliki nilai minimum 16,0 dan maksimum 25,0 serta 20,4 sebagai nilai rata-rata jawaban responden dengan standar deviasi 2,37. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum 20,0 dan maksimum 35,0 serta 27,53 sebagai nilai rata-rata jawaban responden dengan standar deviasi 3,64. Sistem pengendalian intern memiliki nilai minimum 29,0 dan maksimum 42,0 serta 36,38 sebagai nilai rata-rata jawaban responden dengan standar deviasi 2,67. Dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai minimum 20,0 dan maksimum 41,0 serta 33,63 sebagai nilai rata-rata jawaban responden dengan standar deviasi 4,01.

### C. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yaitu menguji validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Sedangkan reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

### 1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/ Pernyataan pada kuesioner yang telah diadarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.4**  
**Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	Pearson Correlation	Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,436** -0,818**	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,513** -0,816**	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,582** -0,782**	Valid
Sistem Pengendalian Intern	0,480** -0,651**	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,557** -0,773**	Valid

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (pearson correlation) menunjukkan korelasi signifikan pada level 0,01 – 0,05 (Sig. (2-tailed) < 0,05) sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *reliability analyze* dimana suatu instrument dapat dikatakan reliable apabila memiliki koefisien cronbach atau alpha sebesar  $<0,60$  tidak reliabel sedangkan  $>0,60$  reliabel. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel V.5 di bawah ini:

**Tabel V.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,797	Reliabel
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,748	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,762	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,736	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,809	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel V.5 menunjukkan tidak ada koefisien cronbach alpha yang kurang dari 0,60. Sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

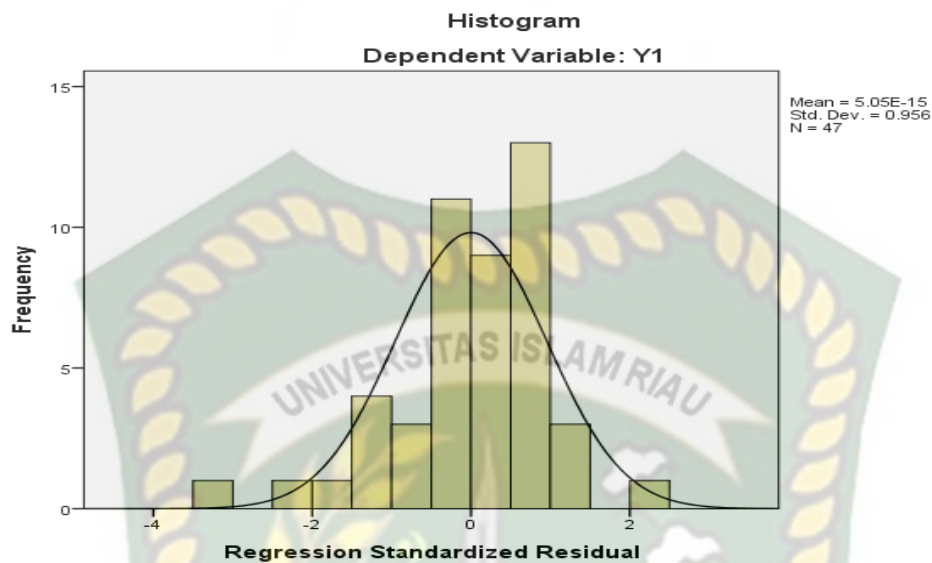
### D. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, *one-sample kolmogorov-Smirnov Test*, dan *Normal Probability Plot* yang dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar V.1 sebagai berikut:



Gambar V.1



Sumber: Data Output SPSS, 2019

Histogram diatas menunjukkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan ditengah, hal tersebut menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Untuk lebih memperjelas hasil normalitas data, dapat dilihat pada tabel V.6.

Berdasarkan gambar V.1 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel V.6**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32737496
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.110
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

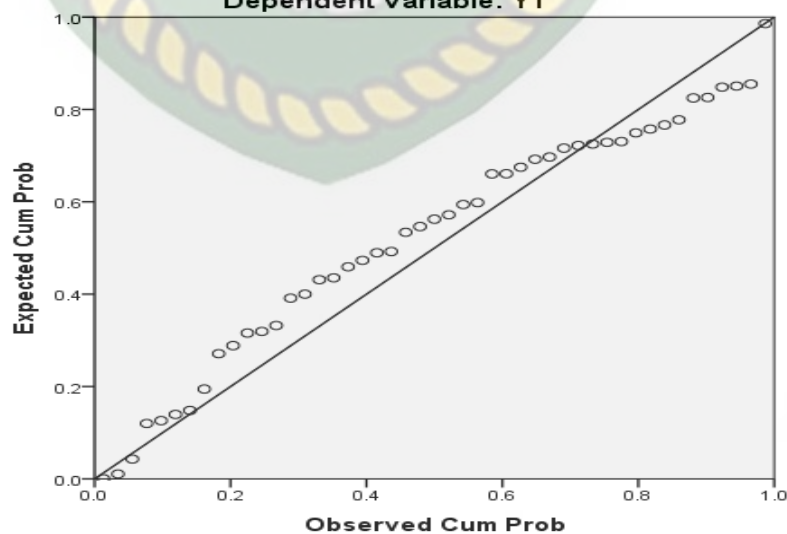
**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,173 yang artinya data-data pada penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu data juga dapat dilihat pada *Normal Probability Plot*, dapat diperhatikan pada gambar V.2 berikut:

**Gambar V.2**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: Y1**



**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22.0 yang dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas harus menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF antara 1-10 dan nilai tolerance lebih dari 10% (0,1). Cara umum yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai *VIF*>10% maka bisa disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

**Tabel V.7**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	KSDM	.641	1.561	Bebas multikolinearitas
	SAKD	.926	1.080	Bebas multikolinearitas
	PTI	.644	1.553	Bebas multikolinearitas
	SPI	.916	1.092	Bebas multikolinearitas

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas variabel Kompetensi SDM memiliki nilai VIF 1,561 dan nilai tolerance 0,641, variabel Penerapan SAKD memiliki nilai VIF 1,080 dan nilai tolerance 0,926,

variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai VIF 1,553 dan nilai tolerance 0,644, variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai VIF 1,092 dan nilai tolerance 0,916. Dari keempat variabel independen tersebut, semua memiliki nilai tolerance di atas atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah atau kurang dari 10 jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

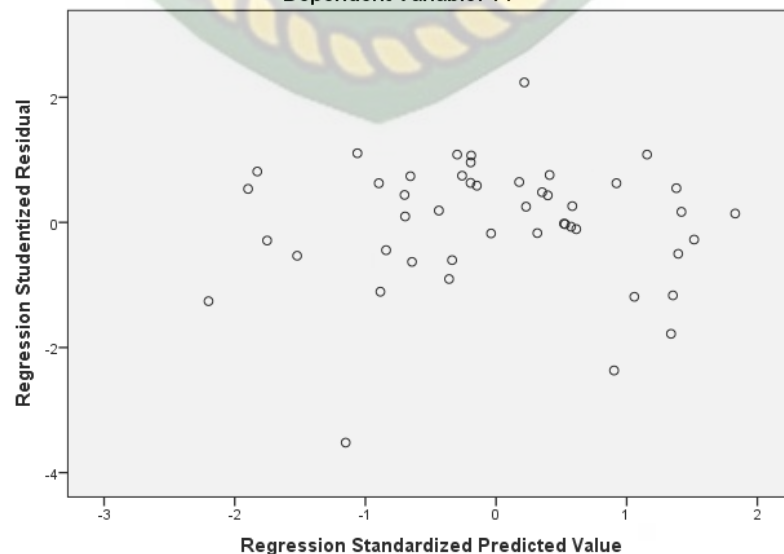
### 3. Uji Heterokedastisitas

Pada uji heterokedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan *Scatter Plot* yang diperoleh dengan bantuan SPSS versi 22.0. Dimana jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Hal ini dapat dilihat pada gambar V.3 berikut:

**Gambar V.3**

Scatterplot

Dependent Variable: Y1



**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan gambar diatas bisa dilihat bahwa, titik-titik penyebaran tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heterokedastisitas.

**E. Analisis Data**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi berganda ini menggunakan SPSS versi 22.0 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.798	.897		.889	.379
	KSDM	.179	.145	.174	1.230	.225
	SAKD	.110	.111	.118	1.000	.323
	PTI	.484	.121	.565	4.005	.000
	SPI	-.028	.178	-.019	-.157	.876

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y=0,798 + 0,179X_1 + 0,110X_2 + 0,484X_3 - 0,028X_4 + e$$

Hasil pembahasan regresi diatas adalah:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,798 artinya jika variabel-variabel independen yaitu kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern bernilai 0 (nol) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bernilai 0,798.
- b. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi SDM ( $X_1$ ) bernilai 0,179 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kompetensi SDM sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,179 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel penerapan SAKD ( $X_2$ ) bernilai 0,110 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penerapan SAKD sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,110 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- d. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ) bernilai 0,484 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,484 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern ( $X_4$ ) bernilai negatif yaitu -0,028 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar 1 maka akan terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,028. Artinya terjadi hubungan negatif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin meningkat sistem pengendalian intern maka semakin turun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **F. Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian ini dilakukan agar mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dengan melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel. Apabila signifikansi  $<0,05$  maka hipotesis diterima dan apabila signifikansi  $>0,05$  maka hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel V.8 dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada hasil dan pembahasan sebagai berikut:

#### **a. Uji Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi dan variabel independen. Untuk variabel kompetensi SDM ( $X_1$ ) nilai signifikansinya adalah  $0,225 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sehingga Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini ditolak.

#### **b. Uji Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_2$ )**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi dan variabel independen. Pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) nilai signifikansinya adalah  $0,323 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sehingga Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini ditolak.

**c. Uji Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )**

Berdasarkan tabel V.8 telah diperoleh hasil uji t yang menguji signifikansi dan variabel independen. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ) mendapat nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sehingga pada penelitian ini Hipotesis 3 (H3), diterima.

**d. Uji Variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ )**

Berdasarkan tabel V.8 telah diperoleh hasil uji t yang menguji signifikansi dan variabel independen. Untuk variabel sistem pengendalian intern ( $X_4$ ) dalam penelitian mendapat nilai signifikansi  $0,876 > 0,05$ . Hal tersebut menjadikan bahwa sistem pengendalian intern ( $X_4$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sehingga dalam penelitian ini Hipotesis 4 (H4) ditolak.

**2. Uji Simultan (Uji F)**

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yaitu kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F atau simultan ini dengan menggunakan SPSS versi 22.0 yang dapat kita lihat dalam tabel V.9 berikut ini:



**Tabel V.9**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.241	4	1.060	9.032	.000 <sup>b</sup>
Residual	4.930	42	.117		
Total	9.171	46			

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, PTI, SPI

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Dari uji ANOVA atau F test, dapat kita lihat nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga Hipotesis 5 (H5) diterima yang mana artinya adalah secara simultan kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **G. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis pertama (H1) ini didapatkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ini disebabkan karena peran dan fungsi yang masih umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk menunjang keahlian dalam bertugas.

Pada variabel ini bernilai 0,179 (positif) hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia bernilai 1 maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,179.

Artinya terjadi hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin meningkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menghasilkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji pengaruh penerapan sistem keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikan ini disebabkan peran dari beberapa karyawan yang belum memahami serta kurangnya wawasan terhadap akuntansi keuangan daerah untuk membantu pengembangan tugas.

Untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bernilai 0,110 (positif) menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah bernilai 1 maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,110. Artinya terjadi hubungan positif antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin meningkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian seperti ini mendukung penelitian terdahulu Wardani (2017) yang mengatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis ketiga (H3) diperoleh bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa karyawan dapat dengan baik memahami terutama yang terukur efektif dan optimal dalam menggunakan teknologi yang ada atau pegawai dapat memahami program yang ada di komputer serta peralatan dan software yang sudah canggih saat ini.

Untuk variabel ini bernilai 0,484 (positif) yang berarti bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi bernilai 1 maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,484. Yang mana artinya adalah terjadi hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Nurillah (2014) yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis keempat (H4) didapatkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pegawai tidak dapat memahami peran dan fungsi yang telah berlaku oleh serta kurangnya wawasan karyawan terhadap sistem pengendalian intern.

Untuk variabel ini bernilai  $-0,028$  (negatif) dapat diartikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar 1 maka akan terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar  $-0,028$ . Artinya terjadi hubungan negatif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin meningkat sistem pengendalian intern maka semakin turun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani (2017) yang menghasilkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Secara simultan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) bahwa Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### H. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel V.10**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 <sup>a</sup>	.462	.411	.34261

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, PTI, SPI

b. Dependent Variable: Kualitas LKPD

**Sumber: Data Output SPSS, 2019**

Pada tabel V.10 *model summary* dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,680 mendekati 1 artinya hubungan semua antara variabel kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat. Korelasinya bersifat positif artinya jika nilai variabel independen naik, maka direspon dengan kenaikan nilai variabel dependen.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,462 artinya bahwa 46,2% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sedangkan sisanya sebesar 53,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini. Jadi, secara simultan variabel independen yaitu kompetensi SDM, penerapan SAKD,

pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Secara bersama-sama (simultan) variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern (X) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau meneliti variabel lain.

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi metode survei dengan mewawancarai agar dapat meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada serta lebih dapat menggambarkan tentang variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2008. Partial Least Squares Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 Untuk Penelitian Empiris, Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, 2004. Manajemen. Alih Bahasa Gina Gania. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Guy. Dan M, 2002. Auditing. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamzah, 2009. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Supranto, 2000. Statistic (Teori dan Aplikasi). Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- KK SAP, 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Prijono, Tjiptoherijanto, 2001. Kebijaksanaan Upah: Tantangan Ditengah Krisis Ekonomi. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*. Volum 3 No.2.
- S. Munawir, 1995. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yoyakarta: BPFE
- Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Wilkinson, Joseph W dan Cerullo, Michael J, 2009. Accounting Information System, Essential Concept and Application. USA: John Wiley & Sons, Inc.

Wahana Komputer, 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Yogyakarta.

Wardani, Dewi. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kab. Labuhan Batu). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara

Pemendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Keuangan

Pemendagri Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(<http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-101578-2018-04-10-penyerahan-lkpd-pemko-pekanbaru-terlambat.html>)

(<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/23-catatansoal-aset-dan-keuangan-dari-bpk-untuk-pemko-pekanbaru>)